

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A Satria, *Dinamika Modernisasi Perikanan, Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*. Bandung: HUP, 2001.
- Abdul Sabaruddin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Arah Menuju Pemerintahan yang Baik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Agus Pramusinto dan Erwana Agus Purwanto, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik (Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia)*, Yogyakarta: Gava Media, 2009.
- Agus Santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Akhmad Fauzi, dkk., *Rencana Arah Pengembangan Bisnis Kelautan Jawa Barat*, Bandung: Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2007.
- Bagir Manan, *Menyongsong Pajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.
- Dedi Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Mutakhir*, Bandung: Pustaka Atadbir, 2006.
- Deddy S. Bratakusumah & Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Ermansah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Fisher S (et.al), *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Diterjemahkan oleh The British Council, Jakarta: Kartikasari, 2000.
- H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

- HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli , Bulat dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Herimanto, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Luky Adriato dan Akhmad Solihin, *Review Terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Conservation International, 2015.
- M. Solly Lubis, *Masalah-Masalah Hukum dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Pustaka Cendekia, 2005.
- M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grfika, 2002.
- Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mahmud Sujuti, *Politik Tarekat*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI Offset, 2002.
- Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1961.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematikanya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rikardo Simamata dan Denny Karwur, *Tinjauan dan Contoh Peraturan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Pesisir di Daerah*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, 2005.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Fokus Media, 2008.

- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- _____, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Satria A, Umbari, Ahmad Fauzi, Purbayanto, E. Sutarto, I. Muchsin, I. Muflikhati, M. Karim, S. Saad, W. Oktariza dan Z. Imran, *Menuju Desentralisasi Kelautan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2002.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Revika Aditama, 2006.
- Sumintarsih. (et.al), *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Nelayan Madura*. Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2005.
- Syaukani HR., Afan Gaffar dan Ryas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Desentralisasi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2014.
- V.P.H. Nikijuluw, *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo dan P3R, 2002.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Zulkarnaen (et.al), *Potensi Konflik di Daerah Pertambangan, Kasus Pongkor dan Cilandak*, Jakarta: LIPI, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perikanan.

C. Sumber Lain

Abu bakar, “*Otonomi Daerah Masalah dan Pemerdayaan 2015*”, diakses pada [http:// www.kemitraan.or.id](http://www.kemitraan.or.id) tanggal 01 Oktober 2015 pukul 19:35.

Arif Satria, “*Kelautan Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*”, dalam: <http://otda.kemendagri.go.id.>, yang diakses pada tanggal 19 Januari 2016, pukul. 17.00 WIB.

Arief Sidharta, “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum,*” dalam *Jurnal Hukum “JENTERA”*, Edisi 3 Tahun II, November 2004.

Agustino, “*Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter van Horn, the Policy Implementation*”, diakses pada <https://kertyawitaradya.wordpress.com> tanggal 01 Oktober 2015, Pukul 22.00.

Dina Sunyowati dan Enny Narwati, “*Penetapan Dan Penataan Batas Wilayah Laut Negara Kesatuan Republik Indonesia*”, *Jurnal Yuridika*, Volume 21, Nomor 3, Mei 2006.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, “*Bidang Perikanan Budidaya*”, dalam [http://diskanlaut.jabarprov.go.id/index.php/.](http://diskanlaut.jabarprov.go.id/index.php/), yang diakses pada tanggal 11 November 2015, pukul 14.30 WIB.

Himawan Sutanto, “*Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut*”, *Jurnal Inovasi*, Volume IX Nomor 2, Juni 2015.

Iskandar, “*Implikasi Alih Kewenangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*”

Tentang Pemerintahan Daerah”, dalam: <http://suttaniskandaralam.blogspot.co.id.>, yang diakses pada tanggal 17 Januari 2016, pukul. 17.15 WIB.

Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, “*Pentingnya Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Perikanan Budi Daya*”, dalam <http://www.djpb.kkp.go.id.>, yang diakses pada tanggal 9 November 2015, pukul 11.00 WIB.

Komariah Pandia, ”Efektifitas Perizinan Usaha Perikanan Dalam Melindungi Sumber Daya Laut Khususnya Ikan”, diakses pada (<http://www.repository.usu.ac>) 27 Mei 2015 Pukul 19:00.

Kusumastanto dan Solihin, “*Aspek Hukum dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut di Era Desentralisasi*” [Makalah]. Disampaikan pada Seminar Nasional *Implementasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut dari Undang-undang Perikanan dalam Proyeksi Pembangunan Pesisir dan Laut ke Depan* diselenggarakan oleh Himasper FPIK-Universitas Brawijaya. 16 September 2004.

L. Adrianto, “*Desentralisasi Kelautan Plus*”, dalam: *Jurnal Kelautan Nasional*, Volume III Nomor 1, Juni 2015.

M. Kaiser & E. M. Forsberg, “Assessing Fisheries- using an Ethical Matrix in a Participatory Process”, *Journal Agricultural an Environmental Ethic* 14, 2001.

Made Suwandi, *Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Dasar Otonomi Daerah di Indonesia*, Makalah Direktur Fasilitasi Kebijakan dan Pelaporan Otda, Jakarta: Ditjen Otda Depdagri, 2007.

Ma’ruf, W.F. dan Agus H.P. *Kesempatan Untuk Memperbaiki Pengelolaan Sumber daya Perikanan Laut Melalui Penerapan UU Nomor 32 Tahun 2004*. Makalah Semiloka: "Konsep Pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah dalam Rangka Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004. Semarang: 25–27 Maret, 2005.

Patris Rofin, “Studi pengelolaan Kawasan Pesisir Untuk Kegiatan Wisata Pantai (Kasus Teleng Ria Kabupaten Pacitan, Jawa Timur)” diakses pada www.academia.edu/3432497 pada tanggal 8 Oktober pukul 12:00.

Reivo Chrestotes Lang, “Analisis Hukum Tentang Kewenangan Pemerintah Kota dalam Mengelola Wilayah Pantai Manado”, dalam: *Jurnal Lex Administratum*, Volume III Nomor 3, Mei 2015.

- Robert Na Endi Jaweng, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Tinjauan Desentralisasi Ekonomi”, dalam: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 47 Tahun 2015.
- Sherlock H. Lekipiouw, “Model Penataan Ruang Laut Daerah Berdasarkan Integrated Coastal Management Sebagai Acuan Penyusunan Penataan Ruang Laut Pada Wilayah Kepulauan”, *Jurnal Sasi*, Volume 16 Nomor 4 Bulan Oktober – Desember 2010.
- _____, “Pengaturan Wewenang dalam Pengelolaan Wilayah Laut”, *Jurnal Sasi*, Volume 20 Nomor 2, Bulan Juli - Desember 2014.
- Tatang Odjo Suardja dan Didi Nursidi, “implementasi diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”, hlm. 3 diakses pada <http://ejournal.kopertis4.or.id> tanggal 9 Oktober 2015 pukul 10:00.
- Titah Vega Tanaya, “Makna Keadilan dan Macam-Macam Keadilan”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume V Nomor 3, Maret 2014.
- Widi Astuti, “Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Layur di Perairan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat” diakses pada repository.ipb.ac.id pada tanggal 8 Oktober 2015 pukul 12:33.